



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUR ASYURA ANGGINI SARI**
2. Jabatan : **KEPALA DIVISI**
3. NHK : **196120**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **2.225.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2290 m2/140 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
3. Bangunan Seluas 32 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **1.550.000.000**

1. MOBIL, OPEL BLAZER MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. MOBIL, MAZDA CX3 MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
5. MOTOR, YAMAHA XSR155 SPORT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. MOBIL, PEUGEOUT SUV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **50.000.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **3.363.939.090**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	60.000.000
Sub Total	Rp.	7.248.939.090
III. HUTANG	Rp.	301.185.352
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.947.753.738

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.